

MASALAH INOVASI SEKOLAH PEMBANGUNAN DI INDONESIA

=====

Oleh: Aceng Muhtaram Mirfani (FIP-UPI)

A. GAMBARAN UMUM INOVASI SEKOLAH PEMBANGUNAN

1. Latar Belakang Hadirnya Sekolah Pembangunan

Sekolah Pembangunan pada dasarnya merupakan sistem persekolahan yang kurikulumnya luas atau mencakup banyak hal. Sekolah menyediakan kemungkinan belajar kepada peserta didik (siswa sekolah) yang normal dan yang luar biasa pandai supaya mereka belajar dengan berhasil dan memuaskan. Di negara asalnya Amerika Serikat sistem sekolah tersebut dikenal sebagai "Comprehensive School". Ciri khas sekolah komprehensif adalah memiliki hubungan erat sekali dengan situasi dimana sekolah itu berada. Di era awal Indonesia menggalakkan pembangunan, awal tahun 70-an, sistem persekolahan tersebut diadopsi sebagai suatu inovasi. Berkaitan dengan semangat pembangunan itulah maka di Indonesia dikenalkan dengan nama "Sekolah Pembangunan".

Berdasarkan hasil lokakarya yang diselenggarakan bulan Juli 1971 dinyatakan bahwa "Sekolah Pembangunan adalah sekolah yang dapat menampung semua siswa dari semua lapisan masyarakat dan membimbing mereka untuk dapat mencapai perkembangan diri secara maksimal, sesuai kecerdasan, bakat dan minat masing-masing, sehingga dapat menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang seimbang dan warganegara yang berjiwa makaria serta bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masya-rakat dan tanah air" (Engkoswara: 1972, edisi asli ejaan lama).

Rumusan Sekolah Pembangunan menurut SK Menteri P dan K No.0172/1971 adalah: "Sekolah yang berorientasi komprehensif, yang dapat menampung anak didik dari semua lapisan masyarakat dan membimbing anak didik menjadi warga negara Pancasila, yang berpribadi berdasarkan akan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, berkesadaran bermasyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar-nya, serta dapat menjadi manusia yang dapat memperkembangkan diri sendiri secara optimal, sesuai dengan kecerdasan bakat dan minat masing-masing, sehingga memiliki kepribadian yang seimbang dan berjiwa makarya serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air" (teks asli ejaan lama).

Penarapannya sebagai suatu inovasi didasarkan atas Kepmen P dan K Nomor 8/1971. Kepentingannya terutama mengatasi krisis pendidikan pada waktu itu. Krisis yang paling menonjol terutama tidak adanya kesesuaian antara apa yang dilakukan dengan apa yang

diharapkan. Sebab utamanya adalah faktor-faktor: (1) banjir-nya peserta didik, (2) kurangnya sumber-sumber, keuangan materi dan tenaga pengajar, (3) naiknya biaya per anak, (4) irrelevansi hasil dengan kebutuhan masyarakat, dan (5) sistem administrasi yang kurang efisien. Sehubungan dengan kondisi tersebut maka sekolah pembangunan dikembangkan dengan dasar-dasar: pandangan psikologi, asa-asa didaktik, ekologi, dan pandangan pendidikan sendiri.

2. Tujuan Sekolah Pembangunan

Secara umum tujuan Sekolah Pembangunan merupakan penjabaran tugas pembangunan di bidang pendidikan, yaitu “membantu anak-anak muda dan orang dewasa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan mereka untuk mengambil inisiatif, menerima serta menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap perubahan-perubahan yang sekaligus merupakan syarat-syarat dan akibat-akibat dari proses modernisasi”. Sasaran pendidikan tersebut dijabarkan secara spesifik dalam seperangkat sasaran yang harus dicapai melalui pembinaan:

- a. Nilai-nilai dan sikap (values and attitudes)
- b. Pengetahuan (Knowledge)
- c. Kecerdasan (cognitive process)
- d. Keterampilan (skills)
- e. Komunikasi dan ekologi, yang memperhatikan adanya interaksi antara manusia dan lingkungannya, baik lingkungan biologi, sosial maupun fisik.

Mengacu kepada sasaran-sasaran tersebut maka Sekolah Pembangunan diarahkan untuk melayani:

Pertama, sekolah menyediakan program yang umum untuk menyediakan warganegara yang baik. Semua anak hendaknya menjadi warganegara Indonesia yang memiliki nilai-nilai dan sikap manusia Pancasila serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar cukup.

Keterangan: SPP = Surat Sertifikat Pendidikan

Sebagai suatu inovasi diawali dengan Pilot Project SD 8 tahun dan SM 4 tahun yang ditugaskan kepada tujuh IKIP, yaitu di Padang, Makasar, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Malang dan dimulai tahun 1972.

B. ANALISIS KETIDAKBERLANJUTAN

1. Ketidakkonsistenan Kebijakan

Secara konseptual, Sekolah Pembangunan dipertimbangkan memiliki keunggulan, khususnya untuk mengatasi problema pendidikan yang dihadapi. Namun sebagai suatu inovasi yang menyangkut perubahan sistem persekolahan adalah tepat untuk mengadopsinya diawali dengan uji coba. Kurang lebih 14 tahun uji coba di delapan IKIP (1972-1986) justru berakhir tanpa kelanjutan.

Sebab yang utamanya terletak pada ketidakkonsistenan atau tidak terpadunya upaya-upaya perbaikan kurikulum. Kurikulum yang dikehendaki untuk penyelenggaraan Sekolah Pembangunan adalah kurikulum yang bervariasi. Sementara kurikulum yang dikembangkan 1984 mengharuskan hanya ada satu macam kurikulum. Karena itu inovasi yang dicobakan pada delapan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) menjadi tidak feasible untuk diterapkan pada sekolah biasa. Maka pada tahun 1986 PPSP dijadikan sekolah biasa. Akibatnya yang langsung adalah pendekatan pengajaran yang bersifat individual dengan menggunakan modul, sebagai salah satu bagian dari inovasi Sekolah Pembangunan, menjadi dihapuskan.

Bila dicermati dari kerangka konseptual bagaimana tahapan-tahapan proses inovasi hendaknya berlangsung. Jelas kiranya kalau inovasi Sekolah Pembangunan mengabaikan apa yang semestinya ada pada tahapan awal proses inovasi tersebut. Mengacu pada Model Proses Inovasi dari Rogers kiranya dapat dikatakan bahwa sebab ketidakberlanjutan inovasi Sekolah Pembangunan di Indonesia berada pada tahapan inisiasi langkah kedua, yaitu "matching". Menurut model Rogers tersebut pada langkah ini dinyatakan "A problem from the organization's agenda is considered together with an innovation, and the fit between them is planned and designed" (Rogers, 1983:363). Pada kasus yang terjadi agenda perbaikan atau pengembangan kurikulum tidaklah memenuhi tuntutan tersebut. Akibatnya inovasi Sekolah Pembangunan pada kenyataannya hanya sebatas uji coba. Jadi kekeliruannya bukan terletak pada inovasinya, melainkan pada faktor kebijakan yang tidak konsisten dengan upaya inovasi itu sendiri.

2. Sebaiknya yang Harus Terjadi

Apa yang sebaiknya terjadi dengan suatu inovasi semacam Sekolah Pembangunan di Indonesia kiranya dapat dikaji berdasarkan model proses inovasi secara lengkap. Model Proses Inovasi menurut Rogers dapat digambarkan sebagai berikut.

Tahapan Proses Inovasi	Kegiatan Utama
I. Inisiasi:	Semua informasi yang diperoleh, konseptualisasi, dan perencanaan untuk mengadopsi suatu inovasi mengarah pada keputusan untuk mengadopsi.
1. Agenda-Setting	Masalah keorganisasian yang umum, yang bisa menjadi kebutuhan yang diterima untuk suatu inovasi dirumuskan; lingkungan yang dicari ditunjukkan pada inovasi-inovasi bernilai potensial bagi organisasi.
2. Matching	Suatu masalah dari agenda organisasi dipertimbangkan bersama dengan suatu inovasi dan kesesuaiannya direncanakan dan dirancang.
----- Putusan untuk mengadopsi -----	
II. Implementasi	Semua kegiatan, tindakan, keputusan terkait dengan inovasi dijalankan.
3. Redefinisi/ Restrukturisasi	(1) Inovasi dimodifikasi dan diperbarui sesuai situasi penting organisasi beserta permasalahannya, dan (2) struktur organisasi yang secara langsung sesuai dengan inovasi agar memungkinkan mengakomodasi inovasi.
4. Klarifikasi	Keterhubungan antara inovasi dan organisasi dirumuskan lebih jelas sebagai inovasi yang sepenuhnya untuk dijalankan.
5. Rutinisasi	Inovasi pada akhirnya dengan sendirinya menjadi suatu elemen dalam aktivitas kelangsungan organisasi.

Memperhatikan model proses inovasi tersebut di atas jika dikaitkan dengan kasus upaya inovasi Sekolah Pembangunan di Indonesia:

Pertama, kebijakan pengembangan kurikulum yang diterapkan tahun 1984 dan juga kebijakan-kebijakan yang menyangkut komponen pendidikan lainnya, seperti fasilitas, ketenagaan dan juga aspek-aspek pengembangan kelembagaan adalah disesuaikan dengan tuntutan atau karakteristik dari Sekolah Pembangunan sebagaimana yang telah dikonseptualisasikan.

Kedua, masa waktu ujicoba sebaiknya ditetapkan secara pasti atau semasa sekitar 14 tahun (1972-1986) yang telah berlangsung hendaknya dilakukan penilaian untuk mempertim-

bangkan saat yang tepat memberlakukan inovasi Sekolah Pembangunan untuk mengganti sistem persekolahan yang biasa.

Ketiga, atas dasar hasil-hasil evaluasi semasa uji coba hendaknya sejauh beberapa hal pada inovasi dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian baik pada komponen inovasinya maupun pada komponen subjek (aparatur pelaksana) dan lingkungan pendukungnya (organisasi, siswa, masyarakat).

Keempat, andaikata inovasi Sekolah Pembangunan telah sepenuhnya menjadi suatu sistem yang diberlakukan maka sudah tentu upaya-upaya penguatan merupakan suatu yang penting dalam rangka pembiasaan atau rutinisasi. Upaya penguatan pada aspek operasional terutama peningkatan daya dukung kegiatan-kegiatan pembelajaran. Di antaranya pendekatan pengajaran individual dengan modul perlu terus dipantau dan dibuat agar semakin melekat sebagai budaya belajar. Artinya pengembangannya terus dilakukan ke arah pemenuhan kebutuhan belajar para peserta didik. Di samping itu upaya-upaya pemeliharaan berbagai komponen terkait, yaitu keseluruhan perangkat Sekolah Pembangunan harus senantiasa terjaga.

3. Pemanfaatan Hasil Uji Coba

Walaupun upaya sepenuhnya inovasi Sekolah Pembangunan tidak berlanjut ada baiknya memperhatikan beberapa komponen hasil uji coba untuk dimanfaatkan. Di antara hasil yang cukup menonjol adalah cara belajar mandiri dan kerjasama. Belajar kerjasama masih dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan pada sekolah-sekolah biasa. Pendekatan cara belajar siswa aktif (CBSA) dapat dikemas dalam bentuk pembelajaran kerjasama. Hal ini telah berlanjut pada upaya-upaya inovasi berikutnya. Misalnya pendekatan CBSA menjadi bagian integral dari inovasi SPP (Sistem Pembinaan Profesional) guru yang untuk tingkat SD telah diujicobakan melalui proyek Cianjur. Kini telah terdesiminasikan ke seluruh pelosok.

Pembelajaran dengan modul yang menghasilkan cara belajar mandiri kiranya masih dapat dilakukan. Sekolah-sekolah yang telah berkembang dengan daya dukung fasilitas yang cukup memadai sangat dimungkinkan untuk menerapkannya. Kuncinya terletak pada kreatifitas yang berkembang di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Kecenderungan penerapan konsep manajemen berbasis sekolah (School-based Management) seiring dengan gerakan desentralisasi akan memberi peluang terciptanya iklim yang kondusif untuk penerapannya.

SUMBER

Depdikbud, 1972, Kurikulum Usaha2 Perbaikan Dalam Bidang Pendidkan dan Administrasi Pendidikan, P2BPSG. Bandung: NV Masa Baru.

Rogers, Everett M, 1983, Diffusion of Innovations, New Yok: Macmillan Publishing Co., Inc.

Tim LP IKIP Bandung, 1991, Beberapa Inovasi Pendidikan, IKIP Bandung

---oOo---